

STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DI TINGKAT KOMISI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

POLITICAL COMMUNICATION STRATEGY OF LEGISLATIVE MEMBERS OF WOMEN AT THE COMMISSION LEVEL IN ACEH PEOPLE'S REPRESENTATIVE

Ainol Mardhiah¹, Dadang Rahmat Hidayat², Agus Rahmat³, Nuryah Asri Sjafirah⁴

¹Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Malikusaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia.

^{2,3,4}Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia.

¹inol_mardhiah@yahoo.co.id; ²dadang.rahmat@unpad.ac.id; ³agus.rahmat@unpad.ac.id;

⁴nuryah.asri@unpad.ac.id

ABSTRACT

This study was designed to describe the communication strategy undertaken by women legislators in the commission. The presence of a small number of women legislators (12 people) from 81 seats made women legislators who sit in the commission unequal in DPRA, make women legislators unable to take much part in the commission, then added by the absence of women legislators in commissions related to women and children in commission F (Health and well-being). This study uses symbolic interaction theory. This research uses descriptive qualitative method, this study want to describe the political communication strategies of women legislative members in Aceh at the commission level. Women legislators in carrying out their communication strategies adjust to the vision of the faction and electoral districts, they have a communication strategy in establishing good communication with members of the commission and also with other commission members, those who support with other legislators as well as their constituents. political communication that takes place within the commission takes place communicative, dialogic communication, communication takes place with semi-formal, lobbi and strong negotiations, coordination takes place well, coordination of communication between women legislators is good, active in providing argumentation, active and humanist communication, and personal between members. Professionally they carry their party's flag, the communication patterns that occur within the commission are interpersonal, group and communication organizations.

Keywords: *Communication Strategy, women legislators, commission, Aceh.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai strategi komunikasi yang dilakukan legislator perempuan di dalam komisi. Kehadiran legislator perempuan dengan jumlah yang sedikit (12 orang) dari 81 Kursi membuat legislator perempuan yang duduk di dalam komisi tidak merata di dalam Alat Kelengkapan Dewan di DPRA, membuat legislator perempuan tidak mampu berkiprah banyak dalam komisi, apalagi ditambah dengan tidak adanya legislator perempuan di dalam komisi yang terkait dengan perempuan dan anak dalam komisi F (Kesehatan dan Kesejahteraan). Penelitian ini menggunakan Teori Interaksi simbolik. Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif diskriptif, kajian ini bermaksud untuk mendeskripsikan strategi komunikasi politik anggota legislatif perempuan di dalam parlemen Aceh di tingkat komisi. legislator perempuan dalam menjalankan strategi komunikasinya menyesuaikan dengan visi fraksi dan dapilnya, mereka memiliki strategi komunikasi sendiri dalam membangun komunikasi yang baik dengan sesama anggota komisinya dan juga dengan anggota komisi yang lain, mereka mampu berkomunikasi dengan baik dengan anggota legislatif yang lain juga dengan konstituennya. Sehingga komunikasi politik yang terjadi di dalam komisi berlangsung komunikatif, dialogis, komunikasi berlangsung dengan semi formil, lobbi dan negosiasi kuat, koordinasi berlangsung baik, kompetensi komunikasi legislator perempuan baik, aktif dalam memberikan argumentasi, komunikasi yang terjadi dinamis dan humanis, secara personal antar anggota komisi dekan namun secara profesional mereka membawa panji partai masing-masing, pola komunikasi yang terjadi di dalam komisi yaitu antarpribadi, kelompok dan komunikasi organisasi.

Kata Kunci: *Strategi Komunikasi, legislator perempuan, komisi, Aceh*

1. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah lembaga legislatif di Aceh, Indonesia. Aceh sebagai daerah yang diberikan otonomi khusus, diberikan kewenangan khusus oleh Pemerintah Indonesia, maka kewenangan dari DPRA diatur secara terperinci oleh Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor.11 tahun 2006. Dalam UUPA tersebut mengatur secara terperinci kewenangan dan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terdapat 81 kursi yang terdiri dari 12 anggota legislatif perempuan dan 69 anggota legislatif laki-laki, Setiap anggota yang terpilih dalam DPRA memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, yaitu Legislasi, *Baggating* dan *Controlling*. Tidak adanya batasan dan perbedaan kinerja dan tanggung jawab dari anggota legislatif perempuan di dalam DPRA.

Di dalam parlemen lokal ini, Aktifitas komunikasi menjadi sebuah keharusan yang mesti dilakukan oleh masing-masing anggota legislatif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penggunaan strategi Komunikasi politik yang tepat menjadi penting sebagai perwujudan dari tugas mereka sebagai legislator. Anggota legislatif adalah wakil rakyat, legislator perempuan harus mampu mempresentasikan dirinya sebagai aktor politik, mampu berdialog menyampaikan pesan-pesan politik secara lugas, efektif, baik secara verbal maupun non verbal dalam lembaga legislatif. Perilaku dari aktivitas komunikasi politik legislator perempuan dengan anggota lainnya diharapkan terjadi melalui proses interaksi (dialog).

Bagi setiap anggota legislatif, termasuk legislator perempuan, parlemen menjadi tempat menjalankan amanah dari konstituennya, tempat menyalurkan aspirasi dari masyarakat, sekaligus tempat untuk menunjukkan eksistensi dan keberadaan mereka secara personal, sosial dan politik kepada masyarakat.

Sebagai seorang legislator, strategi komunikasi politik yang baik dan tepat harus dilakukan oleh legislator perempuan dalam parlemen, yaitu mereka harus mampu melakukan komunikasi politik dengan sesama legislator, baik dengan sesama anggota partainya maupun dengan anggota partai lain di dalam DPRA, kemudian mereka harus membangun komunikasi politik di dalam rapat-rapat yang diselenggarakan baik ditingkat Pansus, Fraksi, Komisi, Paripurna dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bahwa untuk periode 2014-2019 Legislator perempuan tersebar di berbagai Komisi yang ada dalam DPRA. Dari 7 (tujuh) Komisi yang ada, 5 (lima) komisi ditempati oleh anggota legislatif perempuan, kecuali pada Komisi I dan Komisi VI, artinya bahwa legislator perempuan hampir merata di dalam Komisi yang ada dalam DPRA.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Bagaimana strategi komunikasi politik anggota legislatif perempuan di dalam parlemen Aceh di tingkat komisi? Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan dalam menjalankan aktifitas politik mereka di dalam Komisi yang ada di DPRA.

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan strategi komunikasi politik anggota legislatif, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Susilo & Nisa, 2018), hasil penelitiannya mengatakan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan oleh politisi perempuan masih dalam rangka mengukuhkan stereotip yang ada. Mereka melakukan komunikasi dengan cara yang lebih nurturing, memposisikan diri sebagai “ibu” dan berkomunikasi dengan kelembutan, baik verbal maupun nonverbal. Mereka memilih sasaran pemilih perempuan sebagai sasaran utama dan laki-laki sebagai

sasaran berikutnya. Cara ini dianggap cukup beralasan karena jumlah pemilih perempuan lebih banyak dari pemilih laki-laki.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nadezhda Shvedova, 2005). Faktor-faktor yang menyulitkan perempuan masuk ke dalam parlemen: lemahnya akses perempuan ke, dan integrasi ke dalam, lembaga-lembaga politik; menyesuaikan banyak lembaga-lembaga ini sesuai dengan standar laki-laki dan perilaku politik; lemahnya dukungan partai, termasuk uang dan sumber-sumber lainnya untuk membiayai kampanye perempuan dan mendorong kredibilitas politik, ekonomi, sosial, dan politik mereka, kurangnya perhatian media terhadap potensi dan kontribusi perempuan, kurangnya koordinasi dengan dan dukungan dari organisasi perempuan dan organisasi masyarakat lainnya; Rendahnya kepercayaan dan penghargaan diri perempuan, didukung oleh pola-pola kultural tertentu yang tidak memudahkan akses perempuan pada karir politik.

Penelitian mengenai strategi komunikasi politik legislator perempuan dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka di dalam komisi di DPRD akan menggunakan Teori Interaksi Simbolik dari Mead, Teori ini menekankan pada kerangka referensi untuk memahami bagaimana manusia, bersama dengan manusia yang lain, menciptakan dunia simbolik dan bagaimana simbol tersebut nantinya membentuk perilaku manusia. Mead juga menyampaikan bahwa keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok sosial menghasilkan perilaku bersama. Dalam waktu bersamaan, dia juga mengakui bahwa individu-individu yang memegang posisi berbeda dalam suatu kelompok mempunyai peran yang berbeda pula, sehingga memunculkan perilaku yang berbeda pula.

Peneliti melihat bahwa Teori Interaksi Simbolik dari Mead ingin menyampaikan bahwa keberadaan seseorang dalam suatu kelompok masyarakat akan memiliki fungsi dan perilaku yang berbeda pada dirinya tergantung pada posisi atau peran yang dia pegang. (Rahayu, 2010) dalam penelitiannya mengatakan bahwa dalam interaksi simbolik pihak-pihak yang berinteraksi mengambil peran secara seimbang sehingga komunikasi dalam interaksi tersebut dapat berjalan efektif. Dalam interaksi simbolik orang menginterpretasikan masing-masing tindakan dan isyarat orang lain berdasarkan arti yang dihasilkan dari interpretasi tersebut. Interaksi simbolik mempelajari sifat interaksi yang merupakan kegiatan sosial dinamis manusia, individu bersifat aktif, reflektif dan kreatif, menafsirkan, menampilkan perilaku rumit dan sulit diramalkan (Mulyana, 2008).

Legislator perempuan dalam menjalankan aktifitasnya di dalam komisi pada DPRD mereka akan membangun komunikasi politik yang baik dengan sesama anggota komisi yang lain, agar keinginan dan aspirasi dari masyarakat yang diwakilinya dapat tertampung dengan baik. Kajian komunikasi politik adalah kajian tentang hakikat kehidupan manusia untuk mempertahankan hidup dalam lingkup berbangsa dan bernegara. Menurut (Fadillah, 2017) kajian komunikasi politik bersifat dimensional dan kasuistik karena berkaitan dengan berbagai macam problem dan kompleksitas permasalahan. Tidak hanya berkisar pada pembahasan proses komunikasi yang memuat pesan-pesan politik, tetapi juga membahas bagaimana komunikasi dapat berlangsung dalam suatu sistem politik atau sistem pemerintahan yang mencakup bahasan-bahasan bagaimana sistem itu dapat dipertahankan dan dapat berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Menurut (Mc. Nair, 2003) Komunikasi politik, yaitu: 1. Semua bentuk komunikasi yang dilakukan oleh aktor-aktor politik untuk mencapai tujuan khusus, 2). Komunikasi yang ditujukan pada aktor-aktor politik oleh golongan non-politisi seperti pemilih dan kolumnis surat kabar. 3). Komunikasi tentang politisi dan aktifitasnya seperti yang terdapat di laporan berita dan editorial media massa serta bentuk-bentuk diskusi tentang politik. Pada hakekatnya komunikasi politik mengandung informasi atau pesan tentang politik. Selanjutnya (Wahyudin, 2011) yang mengutarakan bahwa komunikasi politik pada dasarnya merupakan bagian dari budaya politik suatu masyarakat, pada saat yang sama komunikasi politik dapat melahirkan, memelihara dan mewariskan budaya

politik, sehingga dengan memperhatikan struktur pesan serta pola-pola komunikasi politik yang diperankannya maka dapat dianalisis budaya politik suatu masyarakat. Singkatnya bahwa komunikasi politik sebagai proses pengiriman pesan-pesan bercirikan politik yang dilakukan oleh aktor politik (legislator perempuan) dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu baik dalam bentuk simbol verbal maupun non verbal. Melalui komunikasi politik pesan-pesan dari komunikator politik akan diketahui mampu diterima dengan baik oleh seluruh anggota yang ada dalam komisi tersebut yang sifatnya traksaksional bukan linier.

Tugas dan kewajiban seorang legislator di dalam parlemen tidak lah mudah, mereka harus mampu membangun komunikasi yang baik, melakukan lobby dan negosiasi dengan anggota yang lainnya, sehingga dibutuhkan strategi komunikasi politik yang tepat dan akurat. (Mukarom, 2015) menyampaikan bahwa keberhasilan suatu kegiatan komunikasi banyak ditentukan oleh strategi komunikasinya. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Selanjutnya Thompson dalam (Rachmiatie et al., 2013) menggambarkan unsur strategi komunikasi sebagai berikut: Pertama, visi organisasi atau perspektif harus dimiliki dan dijadikan acuan dalam mengatur lebih lanjut aktivitas komunikasi. Kedua, menetapkan serangkaian rencana yang diturunkan dari visi dan misi, perencanaan yang tepat juga berangkat dari serangkaian data dan informasi yang ditemukan di lapangan (*fact finding*). Ketiga, menetapkan taktik, yaitu langkah-langkah praktis yang harus ditempuh, dengan sudah mempertimbangkan kemampuan internal serta situasi atau keadaan lapangan. Keempat, meletakkan posisi atau kedudukan organisasi maupun program komunikasi dalam konteks lingkungan yang dihadapi, termasuk menempatkan berbagai komponen komunikasi seperti komunikator, sumber, pesan serta target sasaran; Kelima adalah menyusun pola aktivitas komunikasi, sehingga strategi menjadi jelas dan dapat diikuti atau dijalankan oleh semua pelaku komunikasi. Sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini:



Gambar 1.1 Unsur Strategi Komunikasi Politik
Sumber: Thompson (2001) “Five views of strategy”

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Anggota legislatif perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada periode 2014-2019. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Menurut Creswell (Bungin, 2007) kualitatif bersifat deskriptif, yakni berusaha menggambarkan gejala atau hubungan gejala-gejala yang dijumpai dalam pengamatan selama dilapangan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif yaitu menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi dan berbagai fenomena realitas yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata yang berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Sumber data yang digunakan melalui penelitian kepustakaan (*library research*); dari buku-buku, jurnal, surat kabar, internet, yang terkait dengan isu perempuan dalam politik, khususnya mengenai strategi komunikasi politik legislator perempuan dalam parlemen. Kemudian melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan narasumber penting di lokasi penelitian yang dianggap mewakili kelompok-kelompok yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penentuan narasumber dilakukan secara *purposive* yaitu dengan memperhatikan kemampuan maupun pengetahuan narasumber tentang topik yang dikaji. Selanjutnya melakukan pengamatan atau observasi langsung di lokasi penelitian yang telah ditentukan guna mendapatkan gambaran yang jelas atas permasalahan dari strategi komunikasi politik anggota legislatif perempuan yang hadir di parlemen, sehingga mampu menjawab problematika dalam kajian ini. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komisi merupakan salah satu Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang bersifat tetap dan jumlahnya keanggotaannya juga tetap yang ditentukan pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan Tahun Sidang. Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk Periode 2014-2019 menetapkan 7 (Tujuh) Komisi. Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang. Dengan jumlah 7 (tujuh) komisi dalam DPRA, kompetensi komunikasi politik anggota legislatif perempuan sangat diperlukan agar pesan-pesan politik yang disampaikan oleh legislator perempuan dapat tersampaikan dan terserap dengan baik oleh targetnya dalam Alat Kelengkapan Dewan ini.

Legislator perempuan di DRA duduk di dalam beberapa komisi; Komisi B (Bid.Pendidikan, SDA&Ling.Hidup), Komisi C (Bid.Keuangan & Investasi), Komisi D (Bid.Pembangunan & Tata Ruang), Komisi E (Bid.Pendidikan, Sains & Teknologi) dan Komisi G (Bidang Agama & Kebudayaan), sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Legislator Perempuan Per-Komisi

No	Nama Komisi	Jumlah Legislator Perempuan
1	Komisi B (Bid.Pendidikan, SDA&Ling.Hidup)	1
2	Komisi C (Bid.Keuangan & Investasi)	4
3	Komisi D (Bid.Pembangunan & Tata Ruang)	1

4	Komisi E (Bid.Pendidikan, Sains & Teknologi),	3
5	Komisi G (Komisi Bidang Agama&Kebudayaan)	3
	Total	12

Sumber: Hasil penelitian 2019.

Dari tabel diatas terlihat bahwa legislator perempuan tidak menjadi keanggotaan di Komisi A dan F yaitu Komisi A (Bidang hukum, Politik dan Pemerintahan dan Komisi F (bidang Kesehatan dan Kesejahteraan). Namun mereka tersebar di 5 (lima) komisi yang lain dalam DPRA.

Harapan bahwa hadirnya perempuan akan menjamin kepentingan kaum perempuan yang menjadi salah satu prioritas kebijakan, yang diantaranya terkait dengan isu pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan dan layanan kesehatan yang menjadi tugas utama dari komisi ini.

Kebutuhan dan apa yang diinginkan perempuan yang mengetahui persis kondisi tersebut adalah perempuan sendiri. Sundari (2011) mengatakan bahwa yang memahami dengan baik kebutuhan mendasar perempuan ialah perempuan sendiri dari pada laki-laki, oleh sebab itu keterwakilan perempuan menjadi sangat penting untuk melakukan pembelaan dan mewujudkan pemenuhan kebutuhan mendasar tersebut. Sehingga penempatan legislator perempuan dalam komisi harus betul-betul dipertimbangkan dengan baik oleh fraksi.

Perpindahan atau penempatan seseorang di dalam Alat kelengkapan dewan itu merupakan hak dari fraksi yang berdasarkan pada komunikasi politik dan arahan dari partai politiknya dan perpindahan anggota legislatif dari satu komisi ke komisi yang lain itu dimungkinkan dan hal ini telah diatur dalam tatib DPRA. Perpindahan terjadi karena berbagai pertimbangan dari Fraksi dan Partai pengusungnya. Sehingga yang terlihat dalam DPRA, terjadi kekosongan legislator perempuan pada Komisi I dan VI. Ini merupakan *policy*/kebijakan dari pihak fraksi dengan Partai politik terkait.

Komisi-komisi yang ada dalam DPRA terdiri dari anggota legislatif perempuan dengan latar belakang profesi dan daerah pemilihan yang berbeda dari seluruh Aceh. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai legislator, kebutuhan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama legislator dalam komisi menjadi sebuah keharusan.

Interaksi dan komunikasi terbangun dengan baik oleh setiap anggota legislator di dalam parlemen ini, termasuk pada legislator perempuan. Tugas sebagai legislator dalam komisi itu adalah tugas tim, tugas yang dilakukan secara berkelompok yang dilakukan dalam organisasi parlemen, komunikasi menjadi sebuah keharusan untuk dilakukan. di dalam parlemen termasuk komisi, komunikasi yang hadir didalamnya sebagai sebuah bentuk komunikasi organisasi, dimana jaringan komunikasinya tersebut adalah masing-masing anggota memiliki saling ketergantungan satu dengan yang lainnya dalam konteks organisasi. Goldhaber dalam (Awaru Tenri, dkk, 2019) mengemukakan bahwa komunikasi organisasi melibatkan orang-orang dan sikap mereka, perasaan, hubungan, dan keterampilan dan dalam komunikasi organisasi adanya proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau selalu berubah-ubah.

Terlihat bahwa Interaksi dan komunikasi yang terjalin dalam komisi berjalan dengan baik, komunikatif, karena masing-masing anggota dalam setiap komisi mempunyai tujuan yang sama dan masing-masing personal memposisikan dirinya sebagai mitra kerja, meskipun perdebatan sering terjadi dalam pengambilan sebuah keputusan di dalam komisi. Peneliti melihat hal ini wajar terjadi, karena masing-masing dari anggota komisi itu membawa bendera fraksinya masing-masing. Anggota legislatif perempuan dalam komisi adalah sebuah tim kerja dengan legislator yang lain, yang membuat komunikasi yang hadir ditengah mereka sangat dialogis. Di dalam rapat komisi, komunikasi politik yang dibangun semi formil, artinya bahwa kehadiran mereka dalam pertemuan tersebut

memiliki tujuan dan topik yang jelas untuk dibahas dan didiskusikan, namun komunikasi yang terjadi di dalamnya tidak kaku, setiap anggota diberikan kesempatan dan peluang untuk berbicara dan menyampaikan argumentasi dan pendapatnya. Kedekatan karena intensitas bertemu yang sering membuat komunikasi yang terjadi antar anggota komisi sangatlah cair. Sebagaimana *Teori propinquity* atau teori kedekatan, dimana seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya (*Spatial and geographical proximity*). Sehingga, warna dari komisi-komisi yang ada di dalam DPRA sangat humanis.

Kemampuan komunikasi politik anggota legislatif perempuan dalam rapat atau pertemuan resmi yang dilakukan dalam komisi cukup baik, anggota legislatif perempuan memiliki kemampuan atau pengetahuan yang baik terkait dengan apa yang didiskusikan di dalam komisi, mereka aktif memberikan argumentasi dalam pertemuan atau rapat-rapat yang diselenggarakan di dalam komisi.

Bentuk komunikasi yang terjadi dalam komisi-komisi yang dilakukan oleh legislator perempuan yang ada dalam DPRA itu adalah komunikasi antar personal, kelompok dan organisasi. Dalam komunikasi antar personal itu sifatnya kurang resmi, artinya komunikasi yang berlangsung secara tatap muka, yang terjadi secara personal dan ini biasanya berlangsung pada saat sebelum rapat/pertemuan yang ada dalam komisi. Meskipun demikian, walaupun secara personal mereka dekat namun secara profesional, mereka membawa visi dan misi partai masing-masing. Ternyata kondisi antar partai, juga ikut berpengaruh dalam komunikasi yang dibangun di dalam komisi.

Bentuk komunikasi yang terjadi dalam komisi-komisi itu juga komunikasi kelompok, artinya komunikasi yang terjadi secara resmi dalam pertemuan-pertemuan yang melibatkan semua orang yang ada dalam komisi tersebut. komunikasi kelompok ini terjadi biasanya dalam rapat-rapat dalam komisi, rapat atau pertemuan dalam komisi itu biasanya terencana dan resmi sifatnya, memiliki topik dan bahasan yang jelas. (Tutiasri, 2016) mengatakan bahwa Fungsi dari komunikasi antar anggota kelompok, membuat semua anggota dapat berargumentasi dan mengutarakan pendapat tentang pemecahan sebuah masalah. Sehingga dapat menentukan keputusan dengan tepat untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi kelompok tersebut.

Selain komunikasi kelompok, komunikasi organisasi juga terjadi di dalam DPRA, artinya bahwa pada saat dilakukan pembahasan ditingkat komisi, jika pembahasan terkait dengan pihak eksternal, maka diharuskan untuk mengundang SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh) yang terkait dan melibatkan mereka dalam pembahasan tersebut, maka pada saat tersebut terjadinya komunikasi organisasi.

Dalam aktifitas komunikasi politik penyampaian pesan dalam komisi-komisi dilakukan secara tatap muka dan bermedia. Tatap muka terjadi dalam pertemuan atau rapat-rapat yang diselenggarakan dalam komisi, sama halnya dalam koordinasi yang dilakukan antara anggota legislatif perempuan dengan anggota legislatif yang lain dalam komisi dan juga dengan pihak-pihak terkait. Dalam melakukan komunikasi, legislator perempuan juga memanfaatkan media komunikasi (sms, whatsapp, Instagram, telpon). Terkait dengan koordinasi, keordinasi dilakukan hal yang bersifat kedinasan dan aktifitas mereka sebagai legislator.

Temuan di lapangan terkait dengan kemampuan legislator perempuan dalam memberikan pendapat dalam komisi, Ada beragam pendapat tentang ini, sebahagian menyatakan bahwa kemampuan anggota legislatif perempuan dalam menanggapi persoalan, memberikan argumentasi dan memberikan solusi terkait dengan persoalan yang sedang dibahas dalam komisi masih rendah namun sebahagian yang lain beranggapan bahwa anggota legislatif perempuan memiliki kemampuan atau pengetahuan yang baik dan aktif memberikan argumentasi dalam pertemuan atau rapat-rapat.

Peneliti melihat mengapa adanya perbedaan pandangan dalam memberikan penilaian terkait dengan kemampuan anggota legislatif perempuan dalam komisi, karena adanya perbedaan dalam

keterlibatan legislator perempuan artinya, sebahagian dari anggota legislatif perempuan itu adalah pimpinan di dalam komisi, wakil ketua dan sekretaris, sehingga mewajibkan mereka untuk berbicara, sedangkan sebahagian yang lain hanya diam, itu karena ada perwakilan dari komisi dan fraksinya yang berbicara, sehingga mereka memilih diam. Terlihat bahwa komunikasi anggota legislatif perempuan di dalam komisi itu memiliki dinamika tersendiri, ada sebahagian komisi dengan anggota legislatif perempuannya memiliki kompetensi komunikasi yang baik, namun sebahagian komisi yang lain legislator perempuan memiliki kemampuan komunikasi politik yang rendah.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Howell bahwa untuk melihat mengenai kompetensi komunikasi seseorang bisa dilakukan dengan melihat dari pengetahuan yang dimilikinya sebagai salah satu indikatornya. Pengetahuan tersebut dapat dilihat dari pemahaman mereka mengenai topik yang sedang dibahas atau yang berkaitan dengan yang diperbincangkan di dalam pertemuan atau rapat tersebut. Maka dalam hal ini kompetensi legislator perempuan dapat dilihat pada pemahaman mereka mengenai topik yang dibahas dalam rapat tersebut, kemampuan mereka dalam memberikan argumentasi dan solusi mengenai hal yang dibahas.

Selanjutnya sebagai anggota legislatif dalam menjalankan tugas sehari-harinya sebagai wakil rakyat, legislator perempuan ini dihadapkan pada bagaimana mereka mampu berkomunikasi dengan semua anggota legislator di DPRA, kemampuan dalam koordinasi dan dalam negosiasi diperlukan agar aspirasi masyarakat mampu terakomodir dan terlaksana sesuai yang diharapkan.

Dalam komisi, anggota legislatif perempuan tersebar di beberapa komisi dengan fokus bidang yang berbeda-beda, program usulan dan aspirasi masyarakat dari dapilnya ke parlemen (DPRA) dimungkinkan berbeda dengan komisi yang ditempatinya sekarang, dengan kondisi seperti ini diperlukan negosiasi dan koordinasi anggota legislatif perempuan dengan anggota komisi yang lainnya.

Negosiasi dan lobi itu lebih banyak terjadi dalam hal menyampaikan usulan dari masyarakat (konstituen) pada komisi diluar komisi anggota legislatif perempuan itu sendiri, karena tidak semua usulan itu berkait dengan komisi yang dia duduki sekarang, sehingga mereka melakukan komunikasi dan pendekatan dengan anggota komisi yang lain yang terkait dengan usulan program aspirasi yang dibawa.

Peneliti melihat bahwa lobi dan negosiasi anggota legislatif perempuan banyak dilakukan terkait dengan usulan pada program aspirasi dari masyarakat yang mereka bawa ke dalam komisi, terlihat bahwa komunikasi mereka dalam komisi dengan anggota legislatif yang lain bagus, sama halnya komunikasi antar komisi yang lain, berjalan dengan baik, ini dimungkinkan terjadi karena masing-masing anggota komisi memiliki kepentingan yang sama, serta memiliki tujuan yang sama. Peneliti melihat bahwa legislator perempuan dalam melakukan komunikasi di dalam komisi dilakukan dengan humanis. Menurut (Mahadi, 2017) komunikasi humanis itu adalah cara berkomunikasi yang ingin “dimanusiakan”, yaitu didengar, diperhatikan, dihargai, dihormati, dan tidak mau dilecehkan.

Kegiatan lobi dan negosiasi yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan dilakukan secara informal, dengan melakukan komunikasi secara pribadi dengan anggota komisi yang lain. Berbagai teknik komunikasi dilakukan agar keinginan mereka atau usulan dari program aspirasi yang mereka bawa, bisa terpenuhi sesuai dengan keinginan masyarakat yang ada di Dapilnya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Arifin (2011: 137) bahwa dalam politik kredibilitas dan kompetensi komunikator politik dalam menegosiasikan kepentingannya masing-masing terhadap masalah yang dibicarakan, hal ini sering ditentukan oleh hubungan pribadi para tokoh politik yang berbicara. Dari apa yang dipaparkan oleh Arifin tersirat makna bahwa hubungan pribadi memberikan pengaruh terhadap negosiasi (*bargaining*) politik, selain kredibilitas dan kemampuan komunikasi dari komunikator politik tersebut.

Koordinasi anggota legislatif perempuan di parlemen berlangsung sangat baik, mereka senantiasa berkoordinasi langsung dengan pimpinan masing-masing dalam komisi terkait dengan tugas dan kegiatan yang mereka lakukan, tidak ada hambatan dalam koordinasi diantara mereka karena adanya keterbukaan diantara semua. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Ashfahani, 2019) mengatakan bahwa kualitas keterbukaan mengacu pada sedikitnya tiga hal dalam komunikasi antarpribadi. Pertama, komunikator terbuka kepada orang yang diajaknya berinteraksi. Kedua, kesediaan untuk membuka diri dengan menyampaikan informasi sejujurnya, ketiga, terbuka dalam pengertian ini adalah mengakui bahwa perasaan dan pikiran yang disampaikan adalah memang “milik” kita dan kita bertanggung jawab atasnya.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Thompson mengenai strategi komunikasi legislator perempuan dalam Dewan Perwakilan rakyat Aceh, maka tergambar bahwa legislator perempuan dalam menjalankan strategi komunikasinya mengikuti dari visi fraksi dan dapilnya, Kedua, mereka memiliki perencanaan yang baik, Ketiga, menetapkan taktik, artinya mereka memiliki strategi komunikasi sendiri dalam membangun komunikasi yang baik di dengan sesama anggota komisinya dan juga dengan anggota komisi yang lain. Keempat, mereka memahami dengan baik posisinya di dalam komisi dan terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat di dalam parlemen. Kelima adalah mampu berkomunikasi dengan baik dengan anggota legislative yang lain juga dengan konstituennya.

Dalam Teori interaksi simbolik menekankan bahwa setiap individu mengembangkan pikiran mereka berdasarkan interaksi dengan yang lain, kemampuannya dalam merefleksi diri dari sudut pandang orang lain dan hubungan sosial yang dilakukan oleh setiap individu di tengah masyarakatnya dan terlibat dalam perilaku tersebut yang pada akhirnya akan menghantarkan mereka untuk mengambil peran dalam masyarakat. Kaitannya dengan hal ini bahwa anggota legislatif perempuan menggunakan simbol-simbol yang dipahami sama dalam menjalankan tupoksinya melalui interaksinya di dalam komisi salah satunya. Dalam melakukan interaksi dan komunikasi di dalam komisi tersebut, informan menyesuaikan dirinya pada peran dan fungsi yang melekat pada dirinya yaitu sebagai wakil rakyat, orang yang memperjuangkan aspirasi masyarakat di dalam parlemen.

4. PENUTUP

Komunikasi politik anggota legislatif perempuan di dalam komisi digambarkan berjalan secara baik (komunikatif), masing masing pelaku komunikasi mampu melakukan komunikasi secara dialogis di dalam komisi yang ada di dalam DPRA. Komunikasi yang hadir secara semiformal, artinya bahwa dalam rapat/pertemuan bahasan yang dibahas dilakukan secara resmi, namun masing anggota komisi memiliki kedekatan yang baik sehingga komunikasi yang hadir dalam konteks tersebut terkesan lebih santai. Kemampuan legislator perempuan dalam memberikan tanggapan akan pokok masalah yang didiskusikan cukup baik, artinya bahwa mereka memiliki wawasan dan pengetahuan yang baik terkait dengan yang diperbincangkan di dalam komisi. Komunikasi di dalam komisi sangat dinamis, ini terjadi karena keanggotaan dalam komisi tersebut dari partai politik yang berbeda sehingga komunikasi yang terjadi memiliki dinamika tersendiri, meskipun demikian komunikasinya sangat humanis, secara personal anggota legislatif perempuan dengan legislator yang lainnya di dalam komisi dekat, namun secara professional mereka membawa visi misi fraksinya masing-masing. Komunikasi yang terjalin antar anggota komisi itu adalah secara tatap muka dan bermedia, lobby, negosiasi dan koordinasi antar anggota dalam komisi kuat dan berjalan dengan baik.



Dalam komisi jenis komunikasi yang terjadi adalah komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi.

Dari ulasan diatas, harapannya bahwa legislator perempuan harus juga memikirkan mengenai lahirnya kebijakan yang lebih menyeluruh artinya bahwa mereka tidak hanya bersuara dan bekerja untuk program dapilnya saja (program aspirasi) namun mampu bekerja untuk kesejahteraan masyarakat Aceh serta kehadiran mereka di parlemen, mereka harus lebih mementingkan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan diri dan kelompoknya.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih Peneliti sampaikan bagi semua pihak yang mendukung baik moril dan materil dalam penulisan Jurnal Ilmiah ini, kedepan kritik dan saran sangat peneliti harapkan untuk mendapatkan karya dan tulisan yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashfahani, S. (2019). Implementasi Keterbukaan dan Dukungan dalam Komunikasi Antarpribadi (Studi Komunikasi Pimpinan dan Karyawan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju). *Jurnal Ilmiah Komunikasi (JIKOM) STIKOM IMA*, 11(01), 187. <https://doi.org/10.38041/jikom1.v11i01.69>
- Awaru Tenri, Novi Fitria, Nur Ainun, Maulida Khairunisha. (2019). Komunikasi Organisasi. *Www.Researchgate.Net/Publication/330383213*. <https://doi.org/10.30659/jikm.5.1.31-41>
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan publik dan Ilmu Sosial lainnya. Kencana Prenada Media Group, Jakarta*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Fadillah, D. (2017). Komunikasi Politik Antar Koalisi Parlemen Di Dpr Ri. *Channel, Ilmu Komunikasi*, 5(1), 111–119. <https://doi.org/10.12928/channel.v5i1.6357>
- Mahadi, U. (2017). Komunikasi humanis. *Syi'ar*, 17(01), 11–20. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/syr.v17i1.901>
- Mc. Nair. (2003). *An Introduction to political Communication* (third). Routledge.
- Mukarom, Z. (2015). Strategi Komunikasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*. <https://doi.org/10.15575/JID.V5I2.380>
- Mulyana, deddy dan S. (2008). *Metode Penelitian Komunikasi*. Remadja Rosda Karya, Bandung.
- NADEZHDA SHVEDOVA. (2005). *Perempuan Di Parlemen* (Vol. 2, Issue 3, pp. 38–39). International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA).
- Rachmiatie, A., Hasbiansyah, O., Khotimah, E., & Ahmadi, D. (2013). Strategi Komunikasi Politik dan Budaya Transparansi Partai Politik. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 29(2), 123. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i2.384>
- Rahayu, N. T. (2010). Teori Interaksi Simbolik dalam Kajian Komunikasi. *Widyatama*, 19(1), 99–107.
- Susilo, M. E., & Nisa, N. L. (2018). *Strategi Komunikasi Politisi Perempuan*. 16(April), 54–65.
- Tutiasri, R. P. (2016). *Komunikasi Dalam Komunikasi Kelompok*. 4(1), 81–90. <https://doi.org/10.12928/channel.v4i1.4208>
- Wahyudin, U. (2011). *Komunikasi konstektual. Teori dan Praktek Komunikasi Kontemporer*, Bandung. Remaja Rosdakarya.

